

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN FUNDAMENTAL**



TRANSFORMASI HABITUS DAN KAPITAL DARI KIAI KE POLITISI
Kasus Bupati Bangkalan Madura

PENGUSUL

Suswanta, S.Sos., M.Si

NIDN : 0012086701

Tunjung Sulaksono, S.IP, M.Si

NIDN : 0501057701

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DESEMBER 2016**

**BORANG MONITORING EVALUASI
PENELITIAN FUNDAMENTAL 2016**

No	Komponen	Jenis	Prosentase (%)	Keterangan
1	Capaian penelitian	Pengumpulan data primer, sekunder dan penulisan laporan akhir	100 %	Menunggu konfirmasi dari para narasumber dan persiapan FGD di Madura
2	Pemakalah Forum Ilmiah	Seminar Nasional Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan se-Indonesia (APSIPI), 24-25 November 2016 di Samarinda	100%	Setelah semua data primer dan sekunder terkumpul dan dianalisis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
BORANG MONEV	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL DAN PETA	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Konsep Habitus	14
B. Ranah Sebagai Arena Pertarungan	14
C. Konsep Modal	16
D. Koneksi Antar Modal	16
E. Relasi Praktik Sosial Dengan Habitus, Modal dan Ranah	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
BAB IV DESKRIPSI KABUPATEN SANTRI BANGKALAN	18
A. Kondisi Fisik dan Demografi	19
B. Karakter Sosial Budaya	22
C. Buppa'-Babu'-Guruh-Ratoh	24
BAB V DINAMIKA POLITIK KIAI DI BANGKALAN ERA REFORMASI	29
A. Terbukanya Peluang Politik Kiai	29
B. Munculnya Dominasi Klan Bani Kholil	31
BAB VI HABITUS DAN MODAL KIAI FUAD AMIN IMRON SEBELUM MENJADI BUPATI BANGKALAN	32
BAB VII TRANSFORMASI HABITUS DAN MODAL KIAI FUAD AMIN IMRON SETELAH MENJADI BUPATI BANGKALAN	33
BAB VII PENUTUP	34
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN PETA

Tabel 1.1	Perbedaan Orde Baru dan Reformasi	7
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 2010 – 2012	20
Tabel 4.2	Jumlah Pemeluk Agama	22
Tabel 4.3	Fasilitas Pendidikan	23
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Miskin	24
Tabel 5.1	Politisi Kiai Era Reformasi di Kabupaten Bangkalan	29
Peta 4.1	Rencana Pola Tata Ruang Kabupaten Bangkalan	21

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah penting dan menarik di era reformasi adalah maraknya keterlibatan para pemimpin agama dalam proses politik. Era reformasi memberi kesempatan kepada semua pihak, termasuk kiai¹ untuk terjun dalam dunia politik praktis. Kiai yang dulu hanya dimanfaatkan sebagai pendulang massa dan pembaca doa oleh politisi pada waktu kampanye, sekarang tidak lagi berada di belakang panggung, tapi maju ke depan panggung. Kiai tidak lagi sekedar menjadi makelar budaya (*cultural broker*), akan tetapi menjadi pemain politik (*political player*) dalam pemilu legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah. Beberapa kiai bahkan ada yang terpilih menjadi pemimpin politik (*political leader*).

Beberapa kiai yang menjadi pemimpin partai politik antara lain, K.H. Syukron Makmun, ulama NU yang aktif dalam organisasi dakwah *ittihadul muballighin* di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Beliau mendirikan PNU (Partai Nahdlatul Ummah). PNU mendapat dukungan dari K.H. Idham Chalid, mantan ketua umum PBNU dan K.H. Sahal Mahfudz, Syuriah PBNU. Sedangkan K.H. Yusuf Hasyim (paman Gus Dur) mendirikan PKU (Partai Kebangkitan Ummat) dan mendapat dukungan dari K.H. Shalahuddin Wahid (adik kandung Gus Dur). Sementara itu, K.H. Abdurrahman Wahid (lebih dikenal dengan nama Gus Dur), adalah kiai pertama yang berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Adapun kiai yang dicalonkan sebagai wakil presiden adalah K.H. Hasyim Muzadi dan K.H. Shalahuddin Wahid. Selain beberapa kiai tersebut, masih banyak kiai-kiai lain yang menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat serta calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

¹ Kiai merupakan kata yang sangat familiar dalam masyarakat Indonesia, bahkan khas (*genuine*) dari Indonesia. Terminologi kiai dalam arti cerdas pandai dalam agama Islam telah menjadi terminologi sosiologis-religius yang mengakar kuat dalam kultur masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa timur. Di daerah lain di Indonesia, ada beberapa sebutan yang secara substansial maknanya sama dengan kiai. Di Jawa Barat ada sebutan Ajengan, di Aceh ada sebutan Teungku Dayah, di Minangkabau ada sebutan Buya, dan di Nusa Tenggara Barat ada sebutan Tuan Guru.

Ada lima hal yang menjadi faktor utama pendorong kehadiran kiai di pentas politik,² yaitu : *Pertama*, kurangnya kepercayaan diri para politisi sipil akan kemampuan (diri dan partai/mesin politik) untuk mengolah dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin publik. Minimnya politisinya yang mempunyai basis massa membuat kiai yang diposisikan memiliki “umat” dijadikan penyangga kekuasaan. *Kedua*, rapuhnya jaminan kekuasaan di tingkat konstitusi karena tidak ada partai politik yang menjadi pemenang mayoritas di parlemen (DPR/MPR). Kekuasaan partai politik yang rapuh terbantu oleh hadirnya kiai yang kharismatik dan mempunyai massa solid. *Ketiga*, menguatnya kontrol parlemen dan ekstraparlemen karena berkembangnya pendidikan politik di masyarakat. Tingkat melek politik rakyat juga ditopang dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya perkembangan media sosial yang memungkinkan adanya kontrol dan kritik terhadap kinerja eksekutif, legislatif dan yudikatif selama dua puluh empat jam. *Keempat*, minimnya kekuasaan dan dukungan partisipan bagi para calon legislator, kepala daerah/ wakil atau calon presiden/wakil presiden sebagai konsekuensi sistem multi partai. Kekuasaan presiden yang lemah di tingkat parlementariat akan ditopang oleh kekuatan ekstraparlemen yaitu organisasi masyarakat (ormas) tempat bernaung para kiai sebagai partai politik bayangan yang mempunyai massa real, solid dan fanatik. *Kelima*, adanya keyakinan dari kiai bahwa dengan berpolitik memudahkan mereka memperjuangkan idealitas dan moralitas. Jabatan publik adalah sarana efektif dan efisien untuk memperbaiki kondisi bangsa menuju cita-cita kemerdekaan.

Massifnya partisipasi politik kiai didorong adanya keterbukaan politik era reformasi. Undang-Undang Parpol, pemilu dan pilkada pasca Orba memberi kesempatan kepada semua elemen bangsa untuk berperan secara aktif dalam politik, yaitu memiliki hak dipilih dan memilih. Kesempatan tersebut dimanfaatkan semua pihak -termasuk kiai- setelah sebelumnya hidup dalam sistem politik era Orde Baru yang membatasi atau tidak memberi kesempatan semua pihak melakukan partisipasi politik secara real. Perbedaan antara Orde Baru dan Reformasi dapat dilihat dari aktor politik, modal politik, sikap/partisipasi politik, motif dan pesan politik, serta komunikasi dan alat kontrol politik. Aktor politik era Orde Baru didominasi oleh aparatur negara, elit Golongan Karya dan militer, sementara era reformasi memberi kesempatan kepada kiai, artis, guru, pebisnis dan semua pihak menjadi aktor politik. Dilhat dari sikap dan partisipasi politik terjadi perbedaan mencolok antara era Orde Baru dan reformasi. Sikap politik era Orba dibangun atas prinsip keterpaksaan dan ancaman, sehingga

² Komaruddin Hidayat dan M.Yudie Haryono, *Manuver Politik Ulama : Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara*, (Yogyakarta : Jalasutra, 2004), hal. 39

monoton, semu, penuh tipu dan kepura-puraan, sandiwara serta kebohongan publik. Sementara sikap dan partisipasi politik era reformasi sangat beragam, penuh kompetisi dan berbiaya tinggi alias mahal. Secara ringkas, perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Perbedaan Orde Baru dan Reformasi³

Pembeda	Orde Baru	Orde Reformasi
Aktor Politik	Aparatur negara, ABRI (militer) , milisi, famili dan koneksitas geneologis dan biologis	Pemuka agama (kiai, ustadz), guru, pengusaha dan profesi lain
Modal Politik	Koneksitas politik, kedekatan dengan keluarga Cendana, KKN	Massa, kompetensi, dana, kharisma
Sikap/Partisipasi Politik	Tunggal, monoton, kesadaran semu, hasil mobilisasi dan memerlukan dan tapi tidak terlalu besar	Beragam, kompetitif, kesadaran politik, hasil mobilisasi dan mahal
Motif Politik	Aman, Tenteram, Statis, Seragam dan Tunggal	Dinamis, Partisipatif, Beragam, Popularitas
Pesan Politik	Tunggal, satu arah, eufimisme dan tidak berpihak kepada rakyat	Beragam, multiarah, terang, vulgar dan berslogan pro rakyat
Komunikasi Politik	Didominasi pejabat pemerintah, militer, satu arah (hanya dari pemerintah)	Menyebar ke seluruh elemen masyarakat, LSM, Kampus, Pesantren dan dua arah (pemerintah dan masyarakat)
Alat Kontrol Politik	Sentralisasi oleh pemerintah melalui aturan yang represif (Departemen Penerangan dan militer)	Desentralisasi (umat, partai, ormas) dan peraturan yang relatif partisipatif

Sebagai aktor yang mempunyai kharisma dan basis massa, maka kiai memiliki peran yang sangat strategis jika menjadi pemain politik. Penelitian ini dilandasi oleh ketidakpuasan terhadap penjelasan-penjelasan yang ada tentang tindakan politik kiai dan bertujuan untuk mencari perspektif baru tentang keterlibatan kiai dalam politik, secara khusus indikator keberhasilannya. Sejauh penelusuran penulis, ada dua perspektif tentang keterlibatan kiai dalam politik, yaitu antipati politik⁴ dan simpati politik,⁵ akan tetapi keduanya belum menjelaskan indikator keberhasilannya. Perspektif *antipati politik* dibangun atas asumsi bahwa pada dasarnya Islam dan politik itu terpisah. Dengan demikian, habitus, fungsi dan

³ Terinspirasi dari Komaruddin Hidayat, *Ibid*, hal. 52

⁴ Antipati mempunyai dua arti, *Pertama*, penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat. *Kedua*, perasaan menentang objek tertentu yang bersifat personal dan abstrak. Lihat Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cetakan Ketiga, hal. 43

⁵ Sementara itu, simpati bermakna rasa suka, rasa kasih atau rasa setuju kepada. Lihat, Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Ibid*, hal. 841

tugas antara kiai dan politisi itu berbeda. Habitus kiai adalah nilai-nilai pesantren, yaitu nilai-nilai religius, seperti sabar, tawakal, ikhlas dan sederhana, sementara dunia politik identik nilai pragmatis, oportunistis, pamrih dan gaya hidup mewah. Dunia kiai adalah agama yang sakral dan dogmatis, sementara dunia politik adalah profan yang menuntut rasionalisasi dan sekulerisasi. Ranah gerakan kiai adalah kultural yang berorientasi sosial kemasyarakatan, sedangkan ranah gerakan politisi adalah politik yang berorientasi kekuasaan. Keterlibatan kiai dalam politik hanya akan berdampak negatif baik bagi kiai sendiri, umat maupun bagi agama. Kiai akan mengalami delegitimasi peran, fungsi dan moral. Umat, terutama santri akan terlantar karena tidak ada lagi yang mengajari dan membimbing mereka. Pesantren dan madrasah tidak akan berkembang karena sang kiai sibuk dengan urusan politik. Hadirnya kiai dalam politik juga akan menyuburkan fenomena politisasi agama, yaitu penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik jangka pendek yang bersifat duniawi dan materi. Dengan demikian, kiai harus kembali ke habitatnya ke pesantren sebagai guru yang mendidik umat dengan agama dan keteladanan. Politik biarlah menjadi habitat politisi yang profesional. Tugas kiai adalah menjaga moral politik, jika terjadi penyimpangan dan pembusukan. Kiai harus mengawasi, mengingatkan, dan menegur politisi jika salah arah tanpa harus terjun ke dunia politik. Politik kiai adalah politik moral dan kebangsaan bukan politik praktis dan pragmatis.

Kelemahan asumsi perspektif antipati politik adalah bertentangan dengan hakekat fakta dan sejarah Islam yang tidak membedakan agama dan politik. Pernyataan bahwa keterlibatan kiai dalam politik pasti berakibat negatif juga problematik, mengingat ada kiai politisi yang tetap bersih dan idealis berkomitmen pada moral. Nabi, para sahabat dan para kiai baik di kalangan NU maupun organisasi Islam lain yang menjadi *founding fathers* negeri ini menjadi bukti masih ada kiai politisi yang bersih.

Sementara itu, perspektif kedua yaitu *simpati politik* dibangun di atas asumsi yang berbeda dengan perspektif antipati politik. Asumsi perspektif kedua adalah bahwa Islam tidak memisahkan agama dan politik. Dalam pandangan Islam, politik adalah bagian dari agama. Muhammad SAW bukan sekedar nabi, tetapi juga sekaligus politisi. Sejarah mencatat bahwa Muhammad SAW dalam kurun waktu singkat selama 23 tahun tidak hanya berhasil melakukan revolusi moral melalui karir kenabian, melainkan juga revolusi sosial dan politik melalui pembentukan sistem masyarakat dan politik di Madinah. Sebagai politisi, Muhammad SAW telah membangun “kontrak politik” yang dikenal dengan “*Mitsaq al-Madinah*” atau Piagam Madinah antara umat Islam dan kelompok sosial lain di Madinah. Piagam tersebut adalah “*watsiqah siyasiyah*” atau dokumen politik yang menjamin kebebasan

beragama, berpendapat, perlindungan atas negara, hak hidup, hak milik, dan pelarangan kejahatan.⁶ Meskipun tidak sebagai nabi, akan tetapi kepemimpinan khalifah pasca nabi adalah kepemimpinan agama sekaligus politik.

Berkaitan dengan itu, K.H. Abdullah Faqih mengatakan :

“Sebenarnya, sebagai pewaris para nabi (*waratsatul anbiya*), keterlibatan kiai dalam dunia politik merupakan sebuah keharusan. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, selain dipahami sebagai peristiwa keagamaan, juga merupakan peristiwa politik dalam rangka membangun masyarakat dan pemerintah kota Madinah yang damai, tenteram, tenang, adil dan makmur. Peran Nabi Muhammad SAW waktu itu, selain menjalankan tugas mengajar (*ta’lim*) para sahabat, sewaktu-waktu beliau terjun ke medan laga untuk memimpin pasukan Islam dalam rangka menumpas musuh-musuhnya. Peran kiai hendaknya juga demikian. Selain menjalankan tugas mengajar (*ta’lim*) santri-santrinya, suatu saat para kiai harus ikut membantu urusan negara (politik) sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Jika para kiai hanya mengurus pesantrennya dan tidak tahu-menahu soal urusan negara (politik), pada akhirnya pemerintah dikuasai orang-orang yang anti-Islam, antipesantren, dan anti-ajaran *ahlusunnah waljamaah*. Siapa yang harus menanggung akibatnya? Jadi, sebenarnya keterlibatan kiai dalam politik itu bertujuan menyelamatkan peran kiai itu sendiri.”⁷

Perspektif kedua ini mampu memberi penjelasan tentang landasan syar’i penyatuan agama dan politik. Nabi, para sahabat dan ulama memberi teladan bahwa politik adalah dalam rangka menegakkan *amar ma’ruf nahi munkar*. Teladan yang diberikan nabi, para sahabat dan ulama memang bisa menjadi inspirasi dan ilham bagaimana berpolitik di era global ini, akan tetapi tentu bukan berarti berfungsi sebagai “juklak” dan “juknis” yang harus diterapkan 100% tanpa ada perubahan, mengingat ada perbedaan konteks sosial, politik, dan sejarah. Perspektif kedua ini belum mampu memberi penjelasan tentang fenomena kiai politisi yang korup, pragmatis dan melakukan politisasi agama untuk kepentingan duniawi. Dengan kata lain, perspektif kedua ini belum memberi penjelasan indikator keberhasilan politik kiai agar kontributif dan solutif. Bertolak dari hal ini, menjadi penting perumusan perspektif baru terkait keterlibatan kiai dalam politik yang sesuai dengan tantangan saat ini, khususnya indikator keberhasilannya, agar politik kiai memberi kontribusi dan solusi.

Penelitian ini mengadopsi perspektif simpati politik untuk mengembangkan perspektif baru tentang keterlibatan kiai dalam politik. Pijakan empiris yang digunakan adalah keterlibatan kiai dalam pemilihan bupati di kabupaten Bangkalan, Madura. Untuk menelaah secara objektif dan mendalam, peneliti menggunakan teori Struktural Genetik Pierre

⁶ Muhammad Husein Haikal, *Hayat Muhammad* dalam Ulil Absar- Abdalla, *Muhammad : Nabi dan Politikus*, Media Indonesia, 4 Mei 2005. Lihat juga <http://islamlib.com>, 4 Mei 2005

⁷ Ibid

Bourdieu. Asumsi yang digunakan adalah kiai dipandang sebagai manusia yang mempunyai kepentingan duniawi dan ukhrowi, sehingga bisa melakukan tindakan yang benar atau salah. Kiai dipahami sebagai individu yang terus berproses dan bergerak sesuai situasi aktual, bukan individu dengan ciri dan karakter tetap. Dengan demikian, untuk memahami tindakan politik kiai perlu diperhatikan berbagai faktor sosial yang mempengaruhinya seperti hubungan perkawinan, jaringan transmisi ilmu, organisasi keagamaan dan politik, ideologi dan ajaran, serta heterogenitas maupun variasi pemikirannya.

Merujuk Bourdieu, kehidupan sosial adalah medan pertarungan setiap anggota masyarakat, dan kelompok sosial dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan posisinya, baik dalam hal penguasaan maupun akumulasi modal ekonomi, sosial, simbolik, maupun kulturalnya.⁸ Berkaitan dengan itu, untuk memahami keterlibatan kiai dalam politik, menjadi penting diungkapkan modal yang dimiliki kiai seperti pemilikan tanah atau pesantren, bisnis, pengetahuan agama dan cara transmisinya, hubungan perkawinan, serta jaringan yang dimiliki kiai. Dengan demikian dapat dipahami persamaan dan perbedaan modal kiai sebelum dan sesudah menjadi bupati untuk kasus Bangkalan. Jika terjadi perubahan bagaimana proses dan faktor apa yang menyebabkan. Mengingat politik adalah aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan, maka perlu diungkapkan apakah kiai sebagai aktor politik, juga berkepentingan melanggengkan kekuasaannya demi mewujudkan tujuan politiknya sebagaimana aktor politik lainnya. Jika kiai juga berkepentingan, cara apa yang digunakan kiai untuk melanggengkan kekuasaannya.

Dalam perspektif Bourdieu, tingkat kekuatan anggota masyarakat (termasuk dalam hal ini kiai) dalam pertarungan politik, sangat ditentukan oleh habitus mereka masing-masing.⁹ Habituslah yang menentukan tingkat kemampuan kiai dalam memainkan modal ekonomi, sosial, simbolik, dan kultural yang mereka miliki sehingga modal-modal tersebut dapat terakumulasikan. Mengingat habitus juga yang menentukan respon kiai terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, sehingga membuat kiai dapat bermain terampil

⁸ Faruk, Harga Sebuah Kepekaan dan Suara Lain, Kata Pengantar buku Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat : Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*, (Yogyakarta : LKiS, 1999), hal. xxvi

⁹ Habitus adalah watak (*disposisi*) yang dimiliki oleh individu (dalam hal ini kiai khos) untuk memberikan persepsi dan respon dengan cara tertentu terhadap lingkungan sekitarnya. Disposisi ini bersifat sosial karena merupakan kemampuan yang ditanamkan oleh lingkungan asal dari individu yang bersangkutan. Ditanamkan ke dalam individu tersebut sejak kecil di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial yang lain (pesantren). Akan tetapi, karena proses penanaman disposisi ini berlangsung lama, terus menerus, dan alamiah, maka beroperasi pada individu secara spontan dan instinktif. Karena merupakan hasil proses sosial, maka habitus itu dimungkinkan secara struktur atau terstrukturkan. Akan tetapi karena telah tertanam begitu kuat dan dalam, bersifat spontan dan instinktif, habitus tersebut menyatu dengan subjek dan menjadi kekuatan yang menstrukturkan. Selain itu, habitus itupun tidak sepenuhnya harus patuh pada struktur, melainkan dapat mengalami modifikasi atau fleksibilitas sesuai dengan tuntutan yang dihadapi oleh situasi dan kondisi aktual yang dihadapi pemilikinya. Lihat Faruk, *Ibid*, hal. xxv-xxvii

dalam arena politik, yakni pemilihan bupati, maka menjadi penting dipahami pembentukan habitus kiai, juga kekhasan, persamaan, dan perbedaannya. Pemahaman tentang pembentukan habitus kiai dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara kultur pesantren dengan kultur politik dan pengaruh habitus pesantren terhadap tindakan politik kiai. Lebih lanjut agar diperoleh penjelasan objektif dalam situasi bagaimana seorang kiai bertindak tanpa pamrih dan dalam situasi yang bagaimana pula seorang kiai memperlihatkan pamrih ekonominya.

Mengingat pemilihan bupati adalah ranah politik kiai dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan posisinya, baik dalam hal penguasaan maupun akumulasi modal, maka penting dipahami bagaimana kapital kultural, sosial, ekonomi dan simbolik kiai sebelum dan sesudah menjadi bupati untuk kasus Bangkalan. Selain itu juga perlu dijelaskan kapital apa yang paling dominan digunakan kiai dalam pemilihan tersebut dan apakah terjadi konversi berbagai kapital yang dimiliki kiai menjadi kapital ekonomi. Dengan kata lain, apakah terjadi pergeseran sumber legitimasi kekuasaan kiai, dari penguasaannya selama ini atas kapital sosial, kultural dan simbolik ke modal ekonomi. Jika memang terjadi pergeseran sumber legitimasi kekuasaan kiai, dapat dijelaskan pula faktor apa yang menyebabkannya, apa makna dan dampak dari pergeseran sumber legitimasi kekuasaan kiai tersebut. Lebih lanjut, agar dapat dipahami adanya pola permainan politik kiai dalam pemilihan dan kepemimpinan bupati Bangkalan.

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga penggal permasalahan yang penting dan menarik : *Pertama*, mengingat habituslah yang menentukan respon para kiai terhadap dinamika perubahan politik pemilihan bupati dan habitus juga membuat para kiai dapat bermain dengan terampil dalam pemilihan bupati, maka menjadi penting untuk dijelaskan bagaimana pembentukan habitus para kiai, sebelum dan sesudah menjadi bupati. Hal lain yang tidak kalah penting untuk dijelaskan adalah bagaimana pengaruh habitus pesantren terhadap tindakan politik kiai setelah menjadi bupati.

Kedua, mengingat kiai adalah makhluk politik yang berkepentingan mempertahankan dan meningkatkan posisinya ketika sudah menjadi bupati, baik dalam hal penguasaan maupun akumulasi kapital ekonomi, sosial, simbolik, maupun kulturalnya, maka menarik untuk dijelaskan persamaan dan perbedaan kapital yang dimiliki sebelum dan sesudah menjadi bupati. Dengan memahami kapital yang dimiliki, dapat dijelaskan apakah terjadi ekonomisasi berbagai kapital tersebut. Jika memang terjadi ekonomisasi berbagai kapital kiai, maka dapat dijelaskan bagaimana proses terbentuknya maupun faktor yang mempengaruhinya dan dampak politiknya.

Ketiga, mengingat ranah permainan politik dua kiai tersebut adalah pemilihan bupati secara langsung di kabupaten Bangkalan, Madura, maka menjadi relevan untuk dijelaskan bagaimana kondisi sosio historis masyarakat Bangkalan, Madura serta pengaruh habitus dan kapital kiai terhadap logika tindakan keterlibatan kiai tersebut dalam pemilihan bupati secara langsung. Dengan kata lain, bagaimana dialektika habitus, kapital dan ranah berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam pemilihan tersebut. Pada akhirnya, studi ini mendiskusikan tiga elemen penting, yaitu kiai, kapital dan habitus, sebuah cara baru memahami dan menilai keterlibatan kiai secara lebih objektif, manusiawi, serta mendalam dalam ranah politik.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian untuk tahun pertama adalah :

1. Bagaimana pembentukan habitus kiai yang mencalonkan diri sebagai bupati dalam pemilihan bupati secara langsung di kabupaten Bangkalan, Madura periode 2003-2008 dan 2008-2013? Apakah terjadi perubahan habitus sebelum dan sesudah beliau terpilih sebagai bupati dua periode? Jika memang terjadi, faktor apa yang menyebabkan dan bagaimana proses serta dampak politiknya?
2. Bagaimana kapital ekonomi, sosial, kultural serta simbolik yang dimiliki kiai yang mencalonkan diri sebagai bupati dalam pemilihan bupati secara langsung di kabupaten Bangkalan, Madura periode 2003-2008 dan 2008-2013? Kapital apa yang paling dominan yang beliau gunakan sehingga bisa terpilih sebagai bupati Bangkalan dua periode? Apakah terjadi perubahan atau penambahan kapital sebelum dan sesudah beliau menjadi bupati? Jika terjadi perubahan, seberapa besar, faktor apa yang menyebabkan dan bagaimana proses serta dampak politiknya?
3. Mengapa kiai mencalonkan diri sebagai bupati kabupaten Bangkalan, Madura periode 2003-2008 dan 2008-2013? Faktor apa yang menyebabkan beliau terpilih sebagai bupati dua periode? Bagaimana pengaruh habitus dan kapital yang dimiliki kiai terhadap kepemimpinannya sebagai bupati dua periode di kabupaten Bangkalan, Madura?

C. Tujuan dan Manfaat

Dengan menggunakan perspektif simpati politik dalam kerangka teori Struktural Genetik Bourdieu, studi ini bertujuan untuk membangun perspektif baru tentang keterlibatan kiai dalam politik, yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung mulai dari pencalonan sampai kepemimpinannya sebagai bupati. Perspektif baru tersebut dapat menunjukkan

kemungkinan adanya pertalian berpola antarfaktor yang dimiliki kiai, yaitu dialektika habitus dan kapital ekonomi, sosial, kultural dan simbolik dengan pencalonan dan kepemimpinannya sebagai bupati. Dengan melihat perubahan atas habitus dan kapital dari kiai ke bupati dapat dijelaskan apakah kiai tetap istiqomah dengan habitus pesantren setelah menjadi bupati/gubernur. Juga dapat dijelaskan apakah kiai melakukan kapitalisasi modal selama menjadi bupati. Penjelasan mencakup faktor penyebab, bagaimana proses dan dampak politiknya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan informasi tentang indikator keberhasilan kepemimpinan pejabat publik yang berasal dari kiai, yaitu perubahan habitus dan kapital ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik yang dimiliki. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemimpin agama yang ingin menjadi pejabat publik yang berhasil maupun masyarakat dalam melakukan penilaian kinerja pemerintahan bupati kiai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini akan menggunakan teori Struktural Genetik Pierre Bourdieu, yaitu konsep habitus, kapital, ranah dan praktik sebagai acuan teoritik untuk menjelaskan keterlibatan kiai dalam pemilihan bupati di Bangkalan dan gubernur di Nusa Tenggara Barat mulai dari pencalonan sampai kepemimpinannya. Berikut ini akan dijelaskan konsep habitus, ranah, kapital, konversi antar kapital dan dialektika habitus, kapital, ranah dan praktek.

A. Konsep Habitus

Bourdieu merumuskan konsep habitus sebagai analisis sosiologis dan falsafati atas perilaku manusia. Dalam arti ini, habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati manusia, dan tercipta melalui sosialisasi nilai-nilai dalam waktu lama, sehingga menjadi cara berpikir dan pola perilaku. Habitus dikemukakan Bourdieu sebagai prinsip dan skema yang menghasilkan serta mengatur praktik dan representasi untuk mengatasi dikotomi antara subjektivisme dan objektivisme. Di satu sisi, praktik dan representasi yang dihasilkan habitus bukanlah hasil kepatuhan pada struktur objektif yang diyakini objektivisme. Akan tetapi, di sisi lain, praktik dan representasi juga bukan merupakan keputusan bebas agen sebagaimana keyakinan subjektivisme, melainkan diarahkan oleh habitus.

B. Ranah Sebagai Arena Pertarungan

Konsep ranah atau arena (*field*) adalah perkakas teoritik Bourdieu selain habitus. Habitus memiliki keterkaitan erat dengan posisi sosial tertentu dalam sebuah ranah. Di satu sisi, habitus mendasari terbentuknya ranah, sementara di pihak lain, ranah menjadi lokus bagi kinerja habitus. Kedua perangkat ini bisa dipahami sebagai *double structuring*, yaitu struktur-struktur objektif (ranah) dan struktur habitus menyatu pada pelaku. Berbeda dengan habitus, ranah berada terpisah dari kesadaran individu yang secara objektif berperan menata hubungan individu-individu. Ranah bukanlah interaksi intersubjektif antar individu, melainkan hubungan yang terstruktur dan secara tidak sadar mengatur posisi individu, kelompok atau lembaga dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. Bourdieu mendefinisikan ranah sebagai berikut :

“a network, or configuration, of objective relations between positions. These positions are objectively defined, in their existence and in the determinations they impose upon their occupants, agents or institutions, by their present and potential situation (*situs*) in the structure of the distributions of species of power (or capital) whose possession commands access to the specific profits that are at stake in the field,

as well as by their objective relation to other positions (domination, subordination, homology, etc).”¹⁰

Ranah dibentuk dari jaringan relasi antara posisi yang dihuni oleh agen atau institusi.

Ranah merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal), dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. Ranah juga merupakan arena pertarungan di mana mereka yang menempatnya dapat mempertahankan konfigurasi kekuasaan yang ada. Struktur ranahlah yang membimbing dan memberikan strategi bagi penghuni posisi, baik individu maupun kelompok, untuk melindungi posisi mereka berkaitan dengan jenjang pencapaian social. Apa yang mereka lakukan berdasarkan pada tujuan yang saling menguntungkan bagi produk mereka sendiri. Strategi-strategi agen tersebut bergantung pada posisi-posisi mereka dalam ranah. Ranah dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pemilihan bupati secara langsung di Bangkalan, Madura dan pemilihan gubernur secara langsung di Nusa Tenggara Barat. Adapun praktiknya adalah menjalankan kepemimpinan sebagai bupati dan gubernur

C. Konsep Kapital

Ada empat jenis modal (kapital) yang tersebar dalam ranah sosial. *Pertama*, kapital ekonomi (*Economic Capital*) yang mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda) dan uang. Kapital ekonomi adalah modal yang secara langsung dapat dikonversi dalam bentuk uang dan diobjektifkan dalam bentuk hak milik. *Kedua*, kapital budaya (*Cultural Capital*) adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. *Ketiga*, kapital sosial adalah kumpulan sumberdaya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan saling mengenal dan mengakui. *Keempat*, kapital simbolik, yaitu status atau pengakuan yang dapat mewujudkan menjadi bentuk yang objektif maupun institusi. Segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi yang terakumulasi adalah bentuk dari modal simbolik (*Symbolic Capital*). Kapital simbolik juga hadir dalam bentuk yang lunak, yaitu bagaimana individu atau kelompok dipersepsikan. Istilah kiai khos, tradisional, santun, toleran dan inklusif dapat menjadi representasinya.

¹⁰ Pierre Bourdieu & Loic Waquant, *An Invitation to Reflexive Sociology*, (Chicago : The University of Chicago, 1992), p. 18

D. Konversi Antar Kapital

Secara konsepsional, berbagai bentuk kapital terlihat seperti berdiri sendiri. Akan tetapi dalam praktek, semua jenis modal tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan antar kapital inilah yang disebut sebagai konversi antar kapital. Menurut Bourdieu, karakteristik bentuk-bentuk kapital tersebut dapat dipertukarkan satu sama lainnya dan dapat bertambah atau berkurang. Semakin besar seseorang mengakumulasi kapital tertentu, maka akan semakin besar pula peluang untuk mengkonversi antar kapital. Misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan kapital ekonomi dapat leluasa menampilkan kedermawanannya dengan mendirikan yayasan sosial dan keagamaan dengan memanfaatkan networking dengan penguasa dan pengusaha (kapital sosial) untuk memperoleh image sebagai orang baik dan mendapatkan otoritas serta legitimasi sebagai pembela orang miskin (kapital simbolik).

Konsep kapital dan habitus Bourdieu akan digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan keterlibatan kiai dalam politik, dalam hal ini menjadi bupati dan gubernur. Pembicaraan mengenai kepemilikan tanah, usaha bisnis, dan pesantren dapat dimasukkan ke dalam pembicaraan *kapital ekonomi*. Modal kultural adalah keseluruhan kualifikasi intelektual kiai yang dapat diproduksi melalui pesantren atau pendidikan formal. Faktor pengetahuan agama dan cara transmisinya termasuk dalam *kapital kultural* ini. Sementara itu, *kapital sosial* merujuk pada jaringan yang dimiliki oleh kiai dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Sedangkan *kapital simbolik* adalah segala bentuk prestise, status, otoritas, dan gelar.

E. Relasi Praktik Sosial dengan Habitus, Kapital , dan Ranah

Habitus dan ranah berada dalam hubungan dialektis. Di satu sisi, ranah membentuk habitus yang sesuai dengan struktur dan cara kerjanya. Keikutsertaan dalam sebuah ranah mengandaikan kepercayaan dan penerimaan begitu saja terhadap berbagai struktur, aturan, dan nilai sumberdaya yang diperebutkan di dalamnya. Kepercayaan ini menubuh dalam habitus agen yang merupakan internalisasi struktur objektif ranah. Ia menciptakan logika praktis atau “rasa permainan” pada diri agen, yaitu kemampuan praktis untuk terlibat di dalamnya, dan memberi arti subjektif bagi ranah bahwa ranah itu cukup bernilai untuk diikuti. Di sisi lain, habitus juga membentuk dan mengubah ranah sesuai dengan strukturnya.

Makna dan nilai yang terobjektifikasi melalui sejarah dalam bentuk institusi dan mekanisme hanya aktif sepenuhnya jika dihidupkan kembali oleh habitus dalam bentuk praktik.¹¹

Secara ringkas Bourdieu merumuskan strukturalisme genetiknya yang menerangkan praktik sosial secara matematik sebagai berikut :

$$\{(\mathbf{Habitus}) \times (\mathbf{Capital})\} + \mathbf{Field} = \mathbf{Practics}.$$
¹²

Rumus tersebut menjelaskan bahwa setiap relasi sederhana antara individu dan struktur dengan relasi antara habitus dan arena yang melibatkan modal. Hubungan antara habitus yang berlipat-lipat dengan penguasaan modal (*capital*) di tambah dengan arena (*field*) pertarungan, maka menghasilkan praktik, yaitu arena pertarungan memperebutkan kekuasaan (baik penguasaan sumber daya modal maupun kekuasaan politik).

¹¹ Indi Aunullah, *Bahasa dan Kuasa Simbolik Dalam Pandangan Pierre Bourdieu*, (Yogyakarta : Skripsi, Fakultas Filsafat UGM, 2006), hal. 50-51

¹² Bourdieu, *Distinction : A Social Critique of The Judgment of Taste*, (London : Routledge, 1984), p. 101

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan jenis etnografi. Metode etnografi akan digunakan dalam pengumpulan data. Menurut Nasution, penelitian kualitatif menggambarkan realitas yang kompleks.¹³ Realitas dalam penelitian kualitatif dipandang sebagai sesuatu yang subjektif dan multiple.¹⁴ Pemahaman tentang habitus dan modal yang dimiliki kiai yang menjadi narasumber penelitian akan dilakukan melalui observasi ke pesantren daerah asal kiai, yaitu Bangkalan, Madura. Selain itu juga digunakan teknik wawancara dengan berbagai narasumber terkait yang dapat memberikan penjelasan atau memiliki data-data primer atau sekunder. Adapun teknik dokumentasi dilakukan dengan membaca tulisan atau kitab karangan mereka, dan melakukan penelusuran terhadap pustaka atau literatur yang menjadi rujukan para kiai atau yang menjelaskan permasalahan penelitian. Data deskriptif ini diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan lapangan, ucapan responden, buku-buku ilmiah, majalah, buletin, tabloid dan koran. Observasi ke pesantren, interaksi dan wawancara mendalam dengan kiai serta penelusuran literatur yang menjadi rujukan sekaligus landasan tindakan politik kiai dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan menghindari bias pemahaman.

Analisis data dilakukan melalui teknik kualitatif, yaitu melakukan analisis untuk memperoleh gambaran dan kategori yang kemudian dipolakan. Pola-pola yang ditemukan kemudian diinterpretasikan maknanya sesuai dengan model analisis penelitian. Analisis ini berbentuk induktif, yaitu membangun teori dari data dengan menyajikan data-data terlebih dahulu kemudian dianalisis, dan akhirnya diambil kesimpulan. Upaya interpretasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis melalui beberapa tahapan, *Pertama*, reduksi data yang bertujuan untuk menyeleksi, memilah, memilih, dan mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan tema tertentu. *Kedua*, display data yaitu menyajikan data dalam bentuk sketsa, sinopsis, dan matriks. *Ketiga*, adalah tahap penarikan kesimpulan. Proses analisis akan dilakukan dengan mengikuti siklus interaktif yang tentunya juga sudah dilakukan sejak awal pengumpulan data.

¹³ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik –Kualitatif*, (Bandung : Transito, 1988), hal. 12-14

¹⁴ John W. Creswell, *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*, (California : SAGE 1994), hal.5

BAB IV

DESKRIPSI KABUPATEN SANTRI BANGKALAN

Bangkalan berasal dari kata “Bangkah La’an” yang bermakna “mati sudah”. Kata tersebut terinspirasi dari legenda meninggalnya pemberontak sakti bernama Ke’Lesap di Madura bagian Barat.¹⁵ Pemberontak tersebut dibunuh oleh Raden Adipati Sejo Adi Ningrat I/ Panembahan Tjokro Diningrat V/Pangeran Cakraningrat ke-V pada 1736-1769. Milad kabupaten Bangkalan didasarkan pada masa kejayaan pemerintahan Lemah Duwur (ki Pratanu) di Madura Barat pada tahun 1531. Pusat pemerintahan saat itu di Arosbaya kurang lebih 20 km dari kota Bangkalan ke arah Utara. Ki Lemah Duwur adalah putra dari Ki Pragolbo yang dikenal dengan nama “Pangiran Islam Onggu”. Momentum tersebut disepakati sebagai milad (hari jadi atau kelahiran) kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bangkalan No.6 tanggal 26 April 1992 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan No.145 tanggal 3 September 1992.¹⁶ Bab ini akan menjelaskan kondisi fisik, demografi, sosial budaya, dan karakter masyarakat kabupaten Bangkalan.

A. Kondisi Fisik dan Demografi

Kabupaten Bangkalan adalah salah satu kabupaten yang berada di kawasan pulau Madura, selain Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Secara geografis berada di provinsi Jawa Timur bagian utara dan merupakan pintu masuk menuju Madura. Terletak di antara koordinat 112 40’06’’-113 08’04’ Bujur Timur dan 6 51’39’’ – 7 11’39’ Lintang Selatan. Luas kabupaten Bangkalan mencapai 1.260, 14 km². Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 18 kecamatan, 8 kelurahan dan 273 desa. Adapun batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah Timur dengan kabupaten Sampang, sebelah Barat dan Selatan dengan selat Madura. Wilayah yang terletak di pesisir pantai, seperti Kecamatan Sepuluh, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan Burneh memiliki ketinggian antara 2-10 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Geger memiliki ketinggian 100 meter di atas permukaan laut.

Terdapat sejumlah mata air, waduk, dan sungai di kabupaten Bangkalan. Sungai-sungai utama dari masing-masing kecamatan bermuara di selat Madura dan laut Jawa yang berbatasan langsung dengan kabupaten Bangkalan. Ada 60 lokasi sumber air yang memiliki

¹⁵ TB. Setyawan, et.al., *Bangkalan Era Otonomi Daerah : Perspektif Pembangunan Kabupaten Bangkalan Dalam Kepemimpinan Ir. HM. Fatah, MM* (Bangkalan :Al-Hasaniy Assyafi’iy, 2002), hal. 16

¹⁶ BPS Kabupaten Bangkalan, *Bangkalan Dalam Angka 2013* (Bangkalan, BPS, 2013), hal. xiv

debit yang relatif besar. Sumber air Pocong memiliki debit terbesar yaitu 200 detik/liter sehingga dijadikan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat oleh pemerintah daerah melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Sumber air di kabupaten Bangkalan sangat cocok untuk air minum maupun irigasi.

Jumlah penduduk kabupaten Bangkalan pada 2011 mencapai 1.308.424 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Bangkalan sebesar 2.690, 21 jiwa/Km² dan terendah di kecamatan Kokop sebesar 634,74 jiwa/Km². Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan kotor adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah secara keseluruhan. Adapun peta wilayah administratif secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 2010-2012

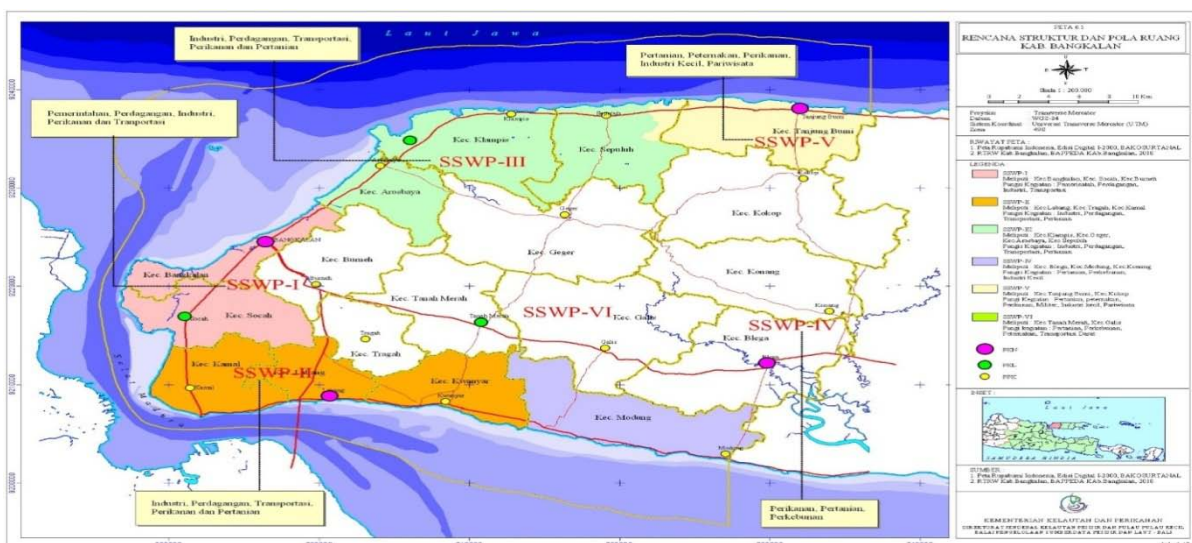
Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk			Tingkat Pertumbuhan			Kepadatan Penduduk		
	Tahun			Tahun			Tahun		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Kamal	45.942	56.743	64.422	0,184	0,184	0,184	1.110	1.371	1.623
Labang	33.322	46.908	18.087	-0,263	-0,263	-0,263	946	1.331	981
Kwanyar	41.751	62.512	43.208	0,017	0,017	0,017	873	1.308	1.330
Modung	43.928	64.816	63.805	0,205	0,205	0,205	558	823	991
Blega	52.058	78.545	34.867	-0,182	-0,182	-0,182	561	846	693
Konang	45.023	59.049	46.719	0,019	0,019	0,019	555	728	742
Galis	72.705	106.968	62.604	-0,072	-0,072	-0,072	603	887	823
Tanah Merah	56.798	100.504	49.966	-0,062	-0,062	-0,062	828	1.466	1.375
Tragah	26.599	41.859	45.323	0,305	0,305	0,305	672	1.058	1.381
Socah	52.953	75.131	90.671	0,309	0,309	0,309	984	1.396	1.827
Bangkalan	76.499	94.211	42.300	-0,256	-0,256	-0,256	2.184	2.690	2.000
Burneh	55.840	81.865	50.759	-0,047	-0,047	-0,047	845	1.239	1.181
Arosbaya	40.203	59.296	20.880	-0,279	-0,279	-0,279	947	1.397	1.006
Geger	62.755	100.182	57.318	-0,044	-0,044	-0,044	509	812	776
Kokop	64.531	79.818	81.811	0,126	0,126	0,126	513	635	715
Tanjung Bumi	48.668	66.320	31.829	-0,191	-0,191	-0,191	721	983	795
Sepulu	38.826	59.272	34.089	-0,063	-0,063	-0,063	530	809	758
Klampis	48.360	74.415	28.692	-0,230	-0,230	-0,230	721	1.109	854

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2012 (BPS)

Bangkalan memiliki banyak potensi menuju kota industri, pariwisata dan jasa. Seiring dengan itu pemerintah daerah bersama DPRD membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029. Visi yang dicanangkan adalah “Terwujudnya Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Sebagai Pintu Gerbang Madura Menuju Kota Industri, Pariwisata dan Jasa”. Terkait dengan itu, kabupaten Bangkalan dibagi menjadi beberapa tingkatan hirarki yang disebut PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKL (Pusat Kegiatan Lokal) dan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan).

Pusat Kegiatan Nasional adalah wilayah yang menjadi pusat regional skala kabupaten sekaligus kutub pertumbuhan utama pada seluruh wilayah kabupaten Bangkalan. Wilayah yang masuk dalam kategori Kawasan Perkotaan Metropolitan Bangkalan adalah kawasan perkotaan Bangkalan sebagai ibukota kabupaten Bangkalan. Kota ini berperan sebagai pusat regional, dengan wilayah pelayanan seluruh kecamatan di kabupaten Bangkalan. Selain itu kawasan perkotaan di kaki jembatan Suromadu yang meliputi kawasan perkotaan di kecamatan Labang. Adapun kecamatan Klampis menjadi pusat kegiatan lokal. Kawasan ini akan berkembang menjadi pelabuhan peti kemas internasional dan memiliki pusat kegiatan transportasi laut skala regional. Sementara itu kutub pertumbuhan desa/kelurahan yang berada di pusat pelayanan kawasan yang terletak di sepanjang jalan utama (arteri/kolektor dan lokal primer), keberadaan guna lahan kawasan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dengan skala pelayanan kecamatan. Rencana pola ruang kabupaten Bangkalan dapat dalam peta berikut ini.

Peta 4.1 Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangkalan



Sumber Data: RTRW Kabupaten Bangkalan 2009 – 2029

B. Karakter Sosial dan Budaya

Karakter sosial budaya dan adat istiadat masyarakat kabupaten Bangkalan sangat dipengaruhi oleh nuansa keagamaan Islam. Islam adalah agama mayoritas penduduk Madura, termasuk Bangkalan. Pengaruh nuansa keagamaan Islam mewujud dari banyaknya praktik ritual seperti pengajian, tahlilan, mujahadah dan khaul. Tiap rumah memiliki mushola dan masyarakat berlomba-lomba membangun masjid yang bagus di lingkungannya. Bagian ini akan menjelaskan kondisi masyarakat dari sisi agama, pendidikan dan kesejahteraan. Bangkalan dikenal sebagai kabupaten santri.

Tabel 4.2 Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Bangkalan

No	Tahun	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	2012	846.650	1.547	1.240	135	475
2	2011	839.950	1.512	1.057	116	63
3	2010	839.940	1.505	1.059	116	63
4	2009	839.850	1.496	1.496	119	61
5	2008	845.420	1.475	1.475	105	58
6	2007	843.710	1.470	1.470	106	56

Meskipun Islam mayoritas, akan tetapi juga terdapat pemeluk agama lain bahkan ada yang mengalami peningkatan jumlah pemeluk setiap tahunnya. Jumlah pemeluk agama Islam justru mengalami pasang surut 845.420 pada tahun 2008 menjadi 839.850 pada 2009. Hal ini menunjukkan ada toleransi beragama di kabupaten Bangkalan. Adapun terkait dengan sarana pendidikan non formal, terdapat sekitar 180 pondok pesantren yang tersebar hampir di setiap kecamatan dengan berbagai variannya. Ada pondok pesantren besar dengan jumlah santri mencapai ribuan, ada yang menengah dan ada yang kecil. Ada yang khusus mengajarkan ilmu agama semata, tetapi juga ada yang mengajarkan ilmu agama sekaligus ilmu umum. Pondok pesantren Syaikhona Kholil menjadi ikon pesantren di kabupaten Bangkalan. Pesantren ini tidak hanya menjadi cikal bakal di Bangkalan tetapi juga Madura. Tidak terhitung ulama di Madura dan Jawa yang dihasilkan dari pesantren ini. Kiai Mohammad Kholil yang menjadi pimpinannya merupakan tokoh kunci lahirnya organisasi NU (Nahdlatul Ulama). Pada saat itu, beliau menjadi rujukan tidak hanya dalam masalah agama, tetapi juga sosial dan politik.

Selain pesantren, juga terdapat banyak sekolah formal umum dan agama dari tingkat dasar sampai menengah atas di setiap kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Fasilitas Pendidikan yang Tersedia Di Kabupaten Bangkalan

Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan						
	Umum				Agama		
	SD	SLTP	SMA	SMK	MI	MTs	MA
Kamal	27	5	1	1	1	2	0
Labang	23	7	2	3	3	4	3
Kwanyar	36	8	1	3	3	3	1
Modung	37	10	3	3	6	12	10
Blega	44	8	5	2	15	8	5
Konang	35	9	0	2	19	6	2
Galis	56	11	0	2	26	12	3
Tanah Merah	53	12	0	3	6	8	1
Tragah	23	5	1	0	2	0	0
Socah	41	4	1	1	2	5	1
Bangkalan	42	12	8	9	1	6	5
Burneh	42	15	8	3	3	10	4
Arosbaya	36	8	4	2	3	6	2
Geger	44	16	1	2	20	5	1
Kokop	40	11	1	2	11	6	1
Tanjung Bumi	37	6	1	1	2	3	1
Sepulu	33	5	1	1	2	3	0
Klampis	34	7	1	0	5	4	1

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Tahun 2012

Selain agama Islam, faktor mata pencaharian dan tingkat pendidikan juga turut mempengaruhi karakter masyarakat kabupaten Bangkalan. Mayoritas masyarakat mengandalkan sektor pertanian dan perikanan. Problem kesejahteraan masih dirasakan oleh masyarakat kabupaten Bangkalan. Rendahnya tingkat pendidikan yang berimbas pada terbatasnya pengetahuan dan lemahnya ketrampilan, minimnya modal untuk usaha dan kurangnya infrastruktur pendukung adalah problem riil yang dihadapi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang telah dicangkan menjadi program pemerintah kabupaten masih belum mencapai tujuan hakikinya. Tujuan hakiki pembangunan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kabupaten Bangkalan secara merata dan berbasis pada potensi sumber daya alam dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, ekologis dan konservasi sumber daya alam. Berikut ini data jumlah penduduk miskin per kecamatan.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
Kamal	2.295
Labang	2.217
Kwanyar	3.975
Modung	8.226
Blega	7.493
Konang	8.717
Galis	9.427
Tanah Merah	5.799
Tragah	3.245
Socah	2.534
Bangkalan	1.917
Burneh	2.696
Arosbaya	2.821
Geger	10.995
Kokop	14.259
Tanjung Bumi	6.020
Sepulu	6.270
Klampis	6.182

Sumber Data: Data Kemiskinan Tahun 2012

C. Buppa'-Babu'-Guruh-Ratoh

Sebagai bagian dari karakter sosial masyarakat Bangkalan adalah menghormati kiai. Kiai memiliki eksistensi dan peran yang istimewa. Kiai bukan saja memiliki peran sentral dalam bidang keagamaan semata, tetapi juga hampir dalam keseluruhan bidang kehidupan. Ungkapan orang Madura yang berbunyi *buppa'-babu'-guruh-ratoh* menjelaskan bagaimana peran sentral kiai tersebut. Ungkapan tersebut menggambarkan hirarki penghormatan di kalangan masyarakat Madura. Elemen utama dalam keluarga yang harus dihormati adalah ayah-ibu (*buppa-babu*). Mereka harus dihormati karena telah melahirkan, mendidik dan membiayai hidup hingga dewasa. Adapun elemen dalam masyarakat yang harus dihormati adalah *guruh* (lebih fokus pada kiai), karena telah memahamkan masyarakat tentang nilai-nilai kebenaran (keagamaan Islam) dalam kehidupan. Elemen terakhir yang juga harus dihormati adalah *ratoh* (pemerintah). Pemerintah adalah pemimpin masyarakat secara keseluruhan sekaligus pembuat kebijakan yang bersifat mengikat dan harus ditaati.

Pengaruh kiai terkadang melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Kiai menjadi tempat mengadu berbagai permasalahan, tidak hanya agama, tetapi juga masalah pendidikan, rizqi, jodoh, pernikahan, kelahiran, kematian, membangun rumah, membangun jalan, merintis usaha, bercocok tanam, konflik rumah tangga, konflik sosial, karier, hutang piutang, politik dan berbagai problema hidup lainnya. Ada perasaan tenang dan tentram jika sudah mengkonsultasikan berbagai problem kehidupan dengan kiai dan mendapatkan restunya. Sebaliknya ada perasaan gelisah, galau dan khawatir jika belum berkonsultasi dengan kiai dan belum mendapat restu dari kiai. Kiai yang dapat diterima masyarakat dan memiliki pengaruh luas adalah yang meluangkan waktu dan bersedia mendengarkan berbagai keluhan umat dengan penuh kesabaran. Kehadiran kiai bisa karena memang diundang ke rumah atau umat yang mendatangi kiai. Kiai juga akan memiliki pengaruh kuat jika mampu memberi solusi, menjadi pengayom dan pelindung umat secara riil. Sebagai imbalannya umat akan tunduk, patuh dan taat kepada kiai. Relasi kiai dan umat adalah relasi antara pemimpin dan yang dipimpin yang bersifat paternalistik seperti hubungan ayah dan anak.¹⁷

Secara historis, ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa kiai memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat Madura, yaitu Islamisasi dan ekologi. *Pertama*, keberhasilan islamisasi oleh para kiai (Walisongo) membuat orang Madura identik dengan Islam. Sulit menemukan penduduk asli Madura yang bukan muslim. Warga Madura dikenal sebagai penganut Islam yang fanatik, meski terkadang mereka belum memiliki pemahaman mendalam tentang Islam dan juga belum menjalankan ajaran Islam secara taat. Mereka akan berdiri di barisan terdepan dan siap melawan serta berkorban jika Islam dilecehkan. Mereka mencontoh yang telah dilakukan oleh para kiai ketika masa penjajahan. Pada saat warga Madura berusaha melepaskan diri dari penjajahan, para kiai berada di garda depan memimpin umat tanpa pamrih. Keberadaan ratusan pesantren yang bertebaran di berbagai pelosok desa di bawah kepemimpinan kiai – pada saat di mana lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah belum ada atau masih terbatas – telah membuat warga Madura tercerahkan dalam bidang agama. Warga Madura merasa berhutang budi pada kiai karena telah mendidik, mengayomi, melindungi dan mencerahkan mereka. Oleh karena dapat dipahami jika mereka sangat hormat kepada kiai dan kemudian menjadikan kiai sebagai pemegang otoritas dalam

¹⁷ Contoh pola relasi paternalisme adalah antara bawahan – atasan. Bawahan memberikan kesetiaan dan kepatuhan kepada atasan/ bapak (patriarchi) sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Lebih lanjut baa MM. Billah, “Pergolakan NU dan Kelompok Islam”, dalam *Tashwirul Afkar*, Majalah Lakpesdam NU, edisi No.2 Tahun 1998, halaman 53.

kehidupan masyarakat. Antara Islam dan Madura adalah dua hal yang saling menyatu dan tidak terpisahkan. Kedua unsur tersebut saling menentukan. Ini berarti jika ada orang asli Madura yang tidak lagi beragama Islam maka orang tersebut tidak lagi disebut sebagai orang Madura. Keanggotaannya sebagai bagian dari kelompok etnik Madura otomatis gugur dan sudah selesai.¹⁸

Kedua, studi yang dilakukan Kuntowijoyo¹⁹ menunjukkan bahwa tanah di Madura tidak didominasi tanah persawahan tetapi oleh tanah tegalan yang gersang dan tidak produktif. Pengelolaan tanah tegalan tidak memerlukan banyak orang, melainkan cukup dikerjakan oleh individu atau sedikit orang dengan tenaga kerja anggota keluarga. Hal ini membuat kurangnya forum kebersamaan warga. Ekologi tegalan juga membuat pola pemukiman orang Madura sulit membangun kerjasama. Desa terbagi menjadi beberapa dusun kecil yang masing-masing terdiri dari empat sampai lima kepala keluarga. Ada kendala teknis dan ekologis yang membuat mereka sulit menjalin komunikasi intensif. Satu-satunya media atau sarana komunikasi efektif adalah melalui pengajian atau sholat Jumat seminggu sekali yang dipimpin oleh kiai. Umat Islam laki-laki yang telah dewasa wajib mendatangi masjid jami' untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah seminggu sekali. Konsekuensinya, paguyuban keagamaan dengan kiai sebagai tokoh sentralnya menjadi inti dari hubungan sosial di masyarakat Madura.

Ditinjau dari asal usul katanya, kata kiai²⁰ berasal dari bahasa Jawa yang digunakan untuk menjelaskan tiga hal. *Pertama*, kiai adalah sebutan untuk benda keramat atau hewan yang dianggap memiliki kekuatan ghaib, seperti kiai Garuda Kencana untuk menyebut kereta emas di Keraton Yogyakarta dan kiai Slamet untuk menyebut kerbau putih di Keraton Surakarta. *Kedua*, Gelar kehormatan untuk orang-orang tua atau sesepuh dalam masyarakat. *Ketiga*, gelar kehormatan yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau memimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning)

¹⁸ Lebih lanjut baca Andang Subahianto, et.al, *Tantangan Industrialisasi Madura : Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur* (Malang : Bayumedia, 2004), hal. 54. Juga Mohammad Kosim, "Islam di Madura : Kajian Awal tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Pulau Madura", *Karsa*, Jurnal STAIN Pamekasan, Vol. VII, No. 1 April 2005, hal. 651-661.

¹⁹ Kuntowijoyo, "Agama Islam dan Politik : Gerakan-Gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura 1913-1920", dalam Huub de Jonge (ed.), *Agama, Kehidupan, dan Ekonomi : Studi-Studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura* (Jakarta : Rajawali Pers, 1989), hal. 51-53

²⁰ Istilah kiai banyak dijumpai di Jawa tengah dan Jawa Timur, sementara di daerah lain menggunakan sebutan yang berbeda-beda seperti Ajengan (Jawa Barat), Tengku (Aceh), Buya (Minangkabau), Tuan Guru (Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah), dan Syekh (Sumatra Utara/ Tapanuli).

kepada para santrinya.²¹ Dalam komunitas santri, mereka dan keluarganya sangat dihormati. Petunjuk dan nasehat kiai sangat dpatuhi. Pada umumnya, kiai berasal dari keluarga bangsawan kaya yang memiliki pesantren dan tanah yang luas.

Secara sosiologis ada dua fungsi kiai di Madura, yaitu sebagai penyampai ajaran Islam dan pemimpin umat. Sebagai penyampai ajaran Islam, kiai merupakan mata rantai keberlangsungan ajaran Islam di muka bumi. Melalui peran ini, kiai diyakini mempunyai otoritas dalam bidang agama karena pemahaman keagamaan yang mendalam. Kedalaman pemahaman dapat dilihat dari lamanya nyantri, jumlah pesantren tempat mencari ilmu, jumlah dan kualitas kiai yang menjadi gurunya dan penguasaan kitab kuning. Jika sosok kiai tersebut adalah alumni Mekah atau Madinah dan tinggal lama di kedua kota suci tersebut maka akan dianggap memiliki kedalaman pemahaman keagamaan yang lebih. Dalam beberapa hal menunjukkan kekhususan dalam bentuk pakaian sebagai simbol ketinggian ilmu yaitu menggunakan jubah dan kopyah putih serta sorban. Sebagai pemimpin umat, kiai telah berhasil membuktikan diri sebagai sosok pemimpin non formal dalam masyarakat, khususnya masyarakat nahdliyin. Pengaruh kepemimpinan kiai sangat ditentukan oleh kedalaman ilmu, kemuliaan akhlak dan wibawa yang dimilikinya. Hal mana tercermin dari kebesaran dan kemajuan pesantren yang dipimpinnya.

Untuk memperoleh predikat sebagai kiai, seseorang harus memiliki kharisma, integritas dan kapasitas keilmuan yang memadai. Kharisma yang dimiliki kiai menjadi salah satu kekuatan yang dapat menciptakan pengaruh dalam masyarakat. Ada dua dimensi kharisma kiai.²² *Pertama*, kharisma yang diperoleh seorang kiai secara *given*, seperti tubuh tinggi besar, atletis, sehat, suara yang keras, penglihatan yang tajam dan adanya ikatan geneologis dengan kiai kharismatik sebelumnya. *Kedua*, kharisma yang diperoleh melalui kemampuan dalam penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan ditunjang dengan kemuliaan akhlak, kepribadian yang sholeh, keikhlasan dalam beramal dan kesetiaan menyantuni masyarakat.

Kiai dalam pandangan masyarakat Bangkalan adalah sosok kharismatik, penuh wibawa dan alim – dalam arti memahami ilmu agama – dan juga dapat menjadi rujukan

²¹ Dalam perkembangan terakhir, penyebutan kiai lebih banyak digunakan untuk kriteria ketiga, yaitu orang yang ahli dalam agama Islam. Secara bahasa, orang yang ahli agama Islam atau mendalam pengetahuan Islamnya disebut alim (plural : ulama). Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta : LP3S, 2011) Cetakan kesembilan, hal. 93.

²² Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menunai Kuasa : Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura* (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2004), hal 87-88

tempat mencari nasehat terkait berbagai masalah kehidupan serta dapat menjadi panutan dalam kehidupan. Ketundukan umat terhadap kiai terkadang melampaui batas wajar, karena umat tidak memiliki keberanian mengoreksi atau mengkritisi perkataan dan perbuatan kiai. Ucapan dan perbuatan kiai dianggap kebenaran sehingga jika melawannya maka takut akan kualat atau membuat kiai marah. Kualat dan kemarahan kiai adalah suatu hal yang tabu dan ditakuti masyarakat Madura, termasuk Bangkalan.

BAB V
DINAMIKA POLITIK KIAI DI BANGKALAN
ERA REFORMASI

A. Terbukanya Peluang Politik Kiai

Salah satu perubahan politik Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru adalah pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung). Pilkada langsung telah memberi harapan dan peluang bagi kiai sebagai elit lokal untuk tampil sebagai *umara* (penguasa). Setelah selama kurang lebih 32 tahun, kiai hanya identik dengan tokoh agama semata maka runtuhnya Orde Baru memberi angin segar bagi kiai untuk tampil sebagai elit politik. Kiai kini tidak lagi hanya berada di belakang layar menjadi tim sukses atau pendulang suara, tetapi telah menjadi pemain politik (*political player*) atau pemimpin politik (*political leader*). Kekuasaan kiai muncul dengan basis sosial, ekonomi dan religi yang sudah dimilikinya. Pasca reformasi, di seluruh kabupaten di pulau Madura, kiai sebagai elit agama muncul sebagai kekuatan politik baru. Beberapa politisi kiai di Madura dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Politisi Kiai Era Reformasi di Madura

Daerah	Jabatan	Riwayat Pendidikan	Riwayat Organisasi
Bangkalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Fuad Amin Imron <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota DPR RI periode 1999-2004 b. Bupati Bangkalan dua periode 2003-2013 c. Ketua DPRD Bangkalan 2014 – 2019 2. KH. Makmun Ibnu Fuad Bupati Bangkalan periode 2013-2018 3. Syafik Rofi'i Wakil Bupati Bangkalan periode 2003-2008 	Pengasuh Pondok Pesantren “Syaichona Kholil” Kabupaten Bangkalan	Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kab. Bangkalan dan DPW PKB Prov. Jawa Timur
Sampang	<ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Fannan Hasib (Wakil Bupati) 2. KH. Mu'in Zain (Ketua DPRD) 	Pengasuh Pondok Pesantren	Pengurus PCNU Kabupaten . Sampang
Pamekasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Kholillurohman (Bupati) 2. KH. Achmad Syafi'i Yasin (Bupati) 	Pengasuh PP Matssaratul Huda	Ketua PCNU Kabupaten Pamekasan
Sumenep	KH. Ramdhan Siroj (Bupati)	Pengasuh PP Nurul Islam	Ketua PCNU dan Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Sumenep
	KH. Abuya Busyro Karim (Bupati)	Pengasuh PP Al Karimiyah	Ketua Tanfidz NU

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala daerah era reformasi di empat kabupaten di Madura telah menempatkan kiai pada posisi penting dan patut menjadi perhatian. Kepala daerah terpilih adalah trah kiai atau memiliki hubungan kekerabatan dengan sosok kiai. Sebut saja Bupati Bangkalan terpilih pada periode 2003-2013 dan 2013-2018 yaitu KH. Fuad Amin Imron dan KH. Muhammad Makmun Ibnu Fuad. Keduanya merupakan ayah dan anak serta keturunan dari kiai Kholil. Demikian juga dengan Bupati Sampang periode 2013-2018 yaitu KH. Fannan Hasib, Bupati Pamekasan periode 2003-2008 yaitu KH. Achmad Syafi'i Yasin dan Bupati Sumenep periode 2010-2015 yaitu KH. Abuya Busyro Karim.

Tampilnya kiai pesantren (*Ulama*) sebagai *Umara'* (Bupati, Wakil Bupati atau anggota DPR/DPRD) menimbulkan kritikan sekaligus harapan. Mereka yang mengkritik berpendapat bahwa tampilnya kiai sebagai *Umara'* hanya akan menghambat proses demokratisasi dan pembangunan di daerah. Budaya feodalistik konservatif ala pesantren yang terbingkai dalam bahasa agama akan menghambat roda kepemimpinan pemerintahan. Demikian juga kultur *sami'na wa atho'na* (sendiko dawuh) atau membenarkan semua perkataan kiai, tidak berani berbeda pendapat atau mengkritisi pendapat kiai kurang kondusif untuk membangun birokrasi pemerintahan yang efektif. Terlebih lagi kualitas personal kiai yang tidak pernah bersentuhan dengan dunia birokrasi dan pemerintahan membuat kiai akan kesulitan melakukan adaptasi kepemimpinan. Politik pemerintahan adalah dunia yang sangat dinamis sehingga membutuhkan figur yang memiliki keilmuan serta wawasan akademik yang luas terasa berbeda dengan figur kiai pesantren. Dunia politik pemerintahan identik dengan kompetisi yang keras, medan pertarungan menang-kalah bukan baik-buruk bahkan cenderung menggunakan semua cara untuk mencapai tujuan utama, yaitu kekuasaan. Prinsip yang dipegang adalah tidak ada kawan atau lawan yang abadi, karena yang abadi adalah kepentingan. Kepentingan bisa berubah dalam waktu singkat tanpa memperhitungkan etika dan moral. Dunia politik pemerintahan seperti itu jelas bukan dunia untuk para kiai. Habitus kiai bukan di ranah politik pemerintahan tapi di pesantren yang identik dengan perjuangan benar-salah dengan mengedepankan etika moral.

Pada sisi lain, muncul harapan dan optimisme terkait dengan masuknya para kiai dalam ranah politik praktis. Mengingat banyaknya kasus politisi korup atau busuk. Fakta berbicara banyak anggota DPR/DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota yang tertangkap tangan oleh KPK karena melakukan suap atau korupsi. Dengan latar belakang habitus pesantren yang positif dan kapital baik ekonomi, sosial, kultural serta simbolik sosok politisi kiai

diharapkan mampu memberi pencerahan dan mewujudkan pemerintahan yang bermoral. Kiai adalah sosok yang memiliki semua modal tersebut, yaitu modal sosial berupa jaringan antar kiai, modal ekonomi adalah kekayaan, modal budaya penguasaan ilmu agama dan transmisi keilmuannya serta modal simbolik yaitu kelompok elit agama yang memiliki kharisma. Figur kiai dianggap mampu membawa perubahan positif pada organisasi pemerintahan karena selama ini dinilai tidak berhasil dan mengecewakan.

B. Munculnya Dominasi Politik Klan Bani Kholil

Pasca reformasi, KH. Fuad Amin Imron (Ra Fuad²³) pengasuh pondok pesantren Syaikhona Kholil berhasil menjadi anggota DPR RI periode 1999-2004. Ra Fuad adalah putra dari KH. Amin Imron, sosok kiai sekaligus politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat nasional. KH. Amin Imron adalah cucu dari Syaikhona Kholil, kiai besar Bangkalan. Beliau adalah tokoh sentral dibalik lahirnya organisasi besar Islam NU. Syaikhona Kholil juga telah banyak melahirkan kiai-kiai besar yang tersebar di Jawa dan Madura. Pada akhir abad ke-19, hampir tidak ada kiai besar yang tidak nyantri (menjadi murid) kiai kholil. Kebesaran dan kemasyhuran kiai kholil tidak hanya terasa di Jawa maupun Madura tapi juga se antero Indonesia. Sesuai tradisi nahdliyin, semua orang takzim kepada kiai kholil termasuk keturunannya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penziarah yang tidak pernah berhenti mendatangi makamnya di sebelah pesantren Syaikhona Kholil di Bangkalan. Kharisma yang besar dari kiai Kholil mampu menutupi kharisma kiai-kiai lain pada masanya. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa masyarakat Bangkalan sangat segan dan hormat kepada Syaikhona Kholil dan otomatis juga kepada keturunannya. Ra Fuad adalah keturunan langsung dari kiai Kholil, yaitu cicit dari Syaikhona Kholil. Status inilah yang membuat Ra Fuad begitu dihormati di Bangkalan.

Dominasi klan bani Kholil semakin terasa pada setiap pemilu legislatif dan pilkada selanjutnya. Dibawah pimpinan Ra Fuad, PKB selalu menjadi pemenang baik di Jatim maupun Bangkalan. Pada pemilu legislatif tahun 1999 dan 2004, PKB Jawa Timur berhasil mendapatkan 24 kursi, sementara pada pemilu legislatif 2009, PKB Bangkalan berhasil mendapatkan 10 kursi. Dengan modal politik yang sangat kuat inilah, terutama sebagai bagian dari klan bani Kholil, Ra Fuad berhasil menang mutlak dalam pemilihan Bupati Bangkalan pada tahun 2003 dan 2008. Seandainya tidak ada pembatasan masa jabatan Bupati, dapat dipastikan bahwa Ra Fuad akan menjadi Bupati Bangkalan seumur hidup. Akan

²³ Ra berasal dari kata *Lora* yang dalam bahasa Madura artinya putra kiai. Sama seperti Gus dalam bahasa Jawa

tetapi karena Ra Fuad sudah menjabat dua periode, maka beliau tidak dapat lagi maju sebagai kandidat Bupati.

Setelah tidak dapat mencalon diri lagi, Ra Fuad awalnya berencana mencalonkan istri mudanya yaitu Nyai Siti Masnuri Fuad Amin sebagai kandidat bupati angkatan 2013-2018. Akan tetapi ternyata yang beliau ajukan sebagai kandidat adalah putra kesayangannya, yaitu Makmun Ibnu Murod (Ra Momon) yang berpasangan dengan Ra Mondir Rofi'i. Pasangan ini berhasil mengalahkan pesaingnya yaitu pasangan Nizar Zahro dan Zulkifli secara mutlak dengan perolehan suara mencapai 90 persen. Sebetulnya ada tiga pasang calon dalam pemilihan bupati langsung di Bangkalan, yaitu KH. Imam Bukhori (Ra Imam) dan HR. Zainal Alim sebagai pasangan nomor urut 1, Makmun Ibnu Murod (Ra Momon) dan Mundir Rofi'i (Ra Mundir) sebagai pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 3 yaitu Nizar Zahro dan Zulkifli. Saingan terberat Ra Momon adalah Ra Imam. Akan tetapi karena ada konflik internal dari partai pengusung pasangan nomor urut 1, yaitu Partai Persatuan Daerah yang berganti nama menjadi Partai Persatuan Nasional maka pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 1 didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bangkalan. Praktis Ra Momon tidak memiliki saingan berat sehingga dapat menang mudah. Ra Momon juga tercatat sebagai bupati termuda, karena pada saat dilantik baru berusia 26 tahun.

Untuk mengokohkan dominasi politik klan bani kholil, sang ayah, Ra Fuad kembali menacalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Bangkalan pada pemilu 2014. Hasilnya, Ra Fuad terpilih menjadi ketua DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014-2019. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan posisi putranya dan agar tidak ada yang akan mengganggu kekuasaan putranya sebagai bupati Bangkalan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dominasi politik klan bani Kholil di kabupaten Bangkalan sangat terasa baik di jajaran legislatif maupun eksekutif. Politik Bangkalan berada di bawah pengaruh kekuasaan dan kendali Ra Fuad secara penuh. Ra Fuad menjadi penentu arah politik masyarakat Bangkalan pasca reformasi. Ra Fuad berhasil membuktikan diri tidak hanya sekedar sebagai kiai, tetapi juga politisi bahkan raja dari dinasti Bani Kholil di Bangkalan.

BAB VI

HABITUS DAN MODAL KIAI FUAD AMIN SEBELUM MENJADI BUPATI BANGKALAN

Habitus dapat didefinisikan sebagai disposisi yang dimiliki kiai untuk melakukan persepsi dan respon terhadap lingkungan sekitarnya dengan cara tertentu. Disposisi tersebut bersifat sosial karena merupakan kemampuan yang ditanamkan oleh lingkungan asal kiai, dalam hal ini lingkungan keluarga, pesantren dan organisasi NU. Pembentukan habitus kiai sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Habitus merupakan faktor subjektif yang ada dalam diri kiai, sedangkan ruang sosial yang ada di sekitar kiai merupakan struktur objektif yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya bersifat dialektik dan mempengaruhi tindakan yang dilakukan kiai. Mengingat, kiai Fuad Amin adalah kiai NU yang memiliki pesantren, maka latar belakang pendidikan dan lingkungan mereka adalah pesantren salafiyah (tradisional) dan NU. Selain itu, mereka juga keturunan kiai (berdarah biru) yang juga memiliki pesantren.

Adapun penjelasan tentang modal yang dimiliki kiai Fuad dan bagaimana pembentukannya menjadi penting. Merujuk Bourdieu, kehidupan sosial adalah medan pertarungan anggota masyarakat dan kelompok sosial dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan posisinya dalam hal penguasaan maupun akumulasi modal ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik. Bab ini akan menjelaskan faktor-faktor yang membentuk habitus kiai Fuad, yaitu latar belakang keluarga dan pendidikan serta modal ekonomi, kultural, sosial dan simbolik yang dimiliki kiai Fuad Amin sebelum menjadi bupati Bangkalan .

A. Habitus Dua Komunitas : Kiai dan Blater

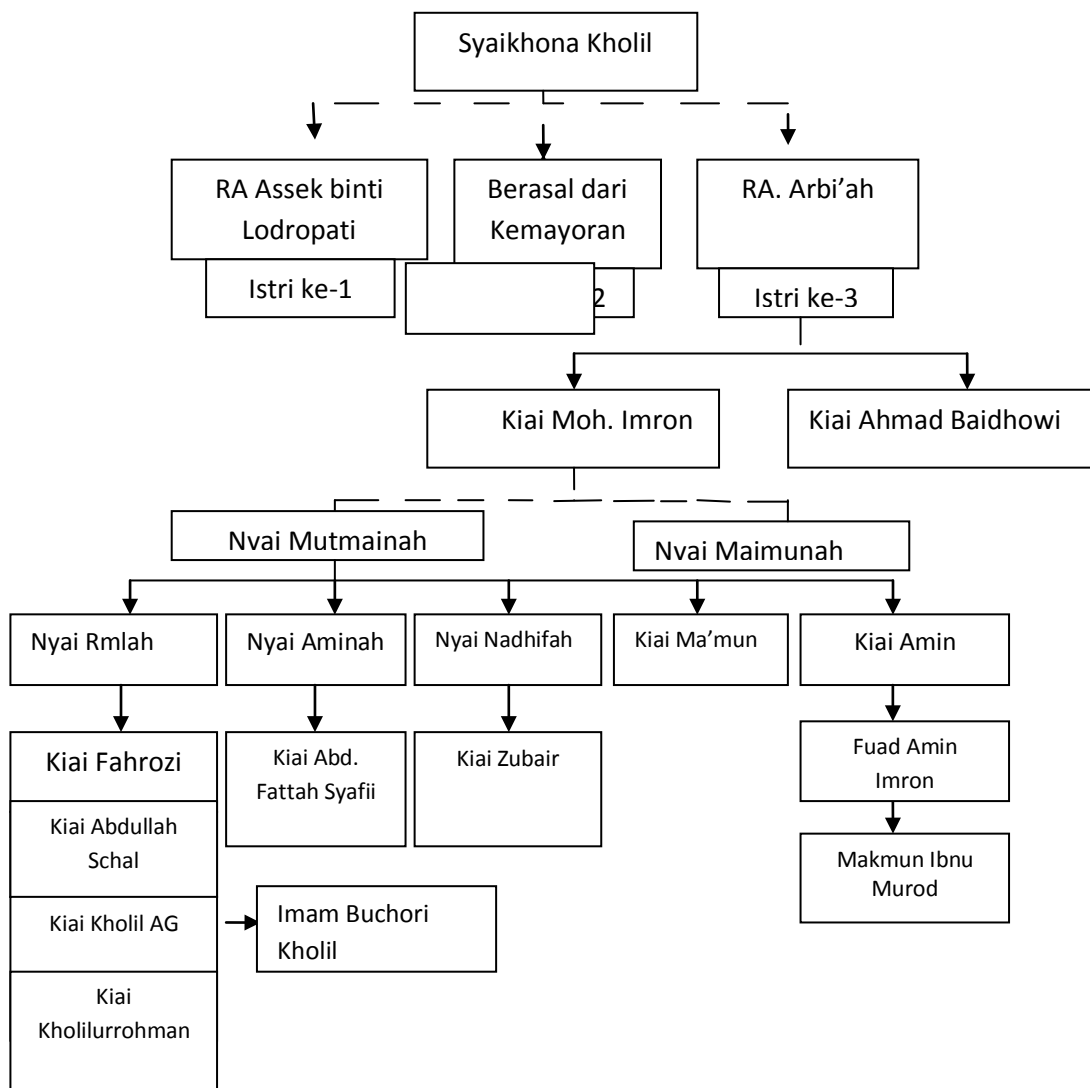
Islam dan kiai memang memiliki tempat khusus dalam kehidupan masyarakat Madura. Kiai menjadi golongan yang paling dihormati jika dibanding golongan sosial lain. Sebutan untuk kiai dalam bahasa Madura adalah keyae (selanjutnya disebut kiai), yaitu orang yang memiliki pengetahuan agama Islam yang mendalam. Biasanya seorang kiai memiliki atau memimpin sebuah pesantren. Akan tetapi, seseorang dapat juga disebut sebagai kiai karena memiliki darah keturunan kiai. Terlebih lagi jika keturunan kiai yang kharismatik, maka semua keturunannya juga disebut kiai dan akan sangat dihormati.

Dari sisi silsilah, Kiai Fuad Amin masih memiliki nasab (garis keturunan) dari Syaikhona Mohammad Kholil. Kiai Fuad Amin adalah cicit dari Syaikhona Kholil atau Mbah Kholil. Beliau adalah kiai yang sangat dihormati oleh masyarakat Madura, lebih khusus lagi Bangkalan. Masyarakat Madura menganggap beliau sebagai kiai penuh kharisma, memiliki wibawa dan karomah serta alim. Alim dalam arti memahami agama, isi kitab-kitab kuning (kitab klasik) dan hukum-hukum syar'i. Selain itu, beliau juga menjadi tempat mengadu semua permasalahan. Syaikhona Kholil adalah guru dari para kiai pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan pemimpin pesantren terkemuka di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, Kiai Abdul Wahab Hasbullah Jombang, Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Bisri Syansuri Jombang, Kiai Manaf Abdul Karim Kediri, Kiai Muhammad Siddiq Jember, Kiai Munawir Yogyakarta, Kiai Maksum Rembang, dan Kiai Bisri Mustofa Rembang.²⁴

pengertian Beliau memiliki dua putra dari istri ketiganya, yaitu Nyai Arri'ah. Putra pertama bernama Mohammad Imron dan kedua bernama Ahmad Baidhowi. Putra kedua meninggal dalam usia lima bulan. Kiai Mohammad Imron memiliki dua istri, yaitu Nyai Mutmainah sebagai istri pertama, dan Nyai Maimunah sebagai istri kedua. Bersama Nyai Mutmainah, Kiai Mohammad Imron memiliki lima keturunan, yaitu Nyai Romlah, Nyai Aminah, Nyai Nadhifah, Kiai Ma'mun dan Kiai Amin Imron. Kiai Amin Imron dikenal sebagai kiai yang mencurahkan hidupnya dalam bidang agama dan politik. Kiai Fuad Amin adalah putra dari Kiai Amin Imron. Secara lengkap silsilah Kiai Fuad Amin dapat dilihat dalam bagan berikut :

²⁴ Syaikhona Kholil (Kiai Muhammad Kholil) hidup pada tahun 1819 – 1925. Beliau adalah putra dari Kiai Bangkalan Kiai Haji Abdul Latif, yang masih memiliki trah Sunan Gunung Jati. Beliau belajar agama langsung dari ayahnya. Kecerdasannya sudah terlihat sejak kecil. Ia mampu menghafal Nadzam Alfiya karya Ibn Malik, yang didalamnya berisi tata bahasa Arab berupa 1000 bait.

Bagan 6.1
Silsilah Kiai Fuad Amin



Keterlibatan kiai Fuad Amin dalam politik praktis tidak terlepas dari pengaruh ayahnya yang memang menjadi aktivis politik.

BAB VII

**PERGESERAN HABITUS DAN KAPITALITASI MODAL SIMBOLIK
KIAI SETELAH MENJADI BUPATI BANGKALAN**

BAB VIII

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar Karim, 1995, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, Yogyakarta : LKiS
- Abdul Chalik, 2010, *NU Pasca Orba*, Disertasi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Tidak Dibukukan
- Abdul Haris, 2010, *Pergeseran Perilaku Politik Kultural NU di Era Multi Partai Pasca Orba*
- Abdul Wahid, *Mutilasi Peran Esoteris Kiai*, Padang To Day, 12 Maret 2011
- Andree Feillard, 1999, *NU vis-avis Negara : Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta : LkiS
- Abdur Rozaki, 2004, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa : Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*, Yogyakarta : Pustaka Marwa
- Ali Maschan Moesa, 2002, *Agama dan Demokrasi : Komitmen Muslim Tradisional Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*, Pustaka Dai Muda, Surabaya
- _____, 2007, *Nasionalisme Kiai : Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta : LKiS

- _____, 1999, *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*, Surabaya : LEPKISS
- Abdul Djamil, 2001, *Perlawanan Kiai Desa : Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifai Kalisasak*, Yogyakarta : LKiS
- Abdul Munir Mulkan, 1992, *Runtuhnya Mitos Politik santri*, Jakarta : Siepress
- Abdurrahman Wahid, 2004, *Intelektual Pesantren : Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta : LKiS
- Ahmad Zahra, 2004, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta : LKiS
- Ahmad Nur Fuad, *Kontinuitas dan Diskontinuitas Pemikiran Keagamaan Dalam Muhammadiyah, 1923-2008 : Tinjauan Sejarah Intelektual*, Disertasi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya
- Achmad Patoni, 2007, *Peran Kiai Pesantren dalam Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Achmad Zaini, 2003, *NU dan Politik, NU dan Politik : Studi Tentang Konflik-Konflik Internal NU 1952-2003*, Tesis UI, Tidak Dibukukan
- Ali Haedar, 1998, *NU dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fiqh Dalam Politik*, Jakarta : Gramedia
- Andang Subahianto, et.al., 2004, *Tantangan Industrialisasi Madura : Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*, Malang : Bayumedia
- Arnold C. Brackman, 1963, *Indonesian Communism : A History*, New York : Frederrick A. Praeger
- Anselm Strauss, Juliet Corbin, 1990, *Basic of Qualitative Research : Grounded Theory and Techniques*, California : SAGE Publications, Inc
- Arizal Mutahir, 2011, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu : Sebuah Gerakan Untuk Melawan Dominasi*, Yogyakarta, Kreasi Wacana
- Bagong Suyanto, (ed), 2010, *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, Yogyakarta, Aditya Media
- Bagus Takwim, 2006, *Habitus : Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup dalam Resistensi Gaya Hidup : Teori dan Realitas*, Yogyakarta, Jalasutra
- Burhan Mungin, 2007, *Penelitian Kualitatif : komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Badrun Alaena, 2000, *NU : Kritisme dan Pergeseran Makna Aswaja*, Yogyakarta : Tiara Wacana
- Bahrul 'Ulum, 2002, *Bodohnya NU atau NU Dibodohi? Jejak Langkah NU Era Reformasi : Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*, Ar-Ruzz, Yogyakarta
- Bambang Pranowo, 1991, *Ceasing The Tradition of Islam in Java*, Disertasi tidak dibukukan
- Binhad Nurrohmat, (Peny), 2010, *Dari Kiai Kampung ke NU Miring*, Malang : Avveroes
- Clifford Geertz, 1960, *The religion of Java*, New York, The Free Press Glenceo
- _____, 1959, "*The Javanese Kyai : The Changing Role of Cultural Broker*", dalam *Comparative Studies in Society and History*
- Dawam raharjo, 1983, *Dunia Pesantren Dalam Peta Pembaharuan*, Jakarta : LP3S
- Donald Hindley, 1966, *The Communist Party in Indonesia, 1951-1963*, Berkeley and Los Angeles : University of California Press
- Djam'an Satori, Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Endang Turmudzi, 2003, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta : LKiS
- E.Kristi Poerwandari, 1994, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta : LPSP3 Fakultas Psikologi UI

- Flick Uwe, 1995, *An Introduction to Qualitative Research*, London : SAGE Publications
- Ernst Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Ikhtiar
- Fauzi Fashri, 2007, *Penyingkapan Kuasa Simbol : Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta, Juxtapose
- Flick Uwe, 1995, *An Introduction to Qualitative Research*, London : SAGE Publications
- Greg Fealy, 2003, *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta : LKiS
- Hamid Patilima, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Haedar Nashir, 2007, *Gerakan Islam Syariat : Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta, PSAP
- Haryamoko, 2003, *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa : Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu*, Jurnal Basis Edisi Khusus Pierre Bourdieu, No 11-12
- Hiroko Horikoshi, 1987, *Kiai dan Perubahan Sosial*, Jakarta : P3M
- Huub de Jonge (ed.), 1989. *Agama, Kehidupan dan Ekonomi : Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*, Jakarta : Rajawali Pers
- Ibn Qoyim Ismail, 1997, *Kiai Penghulu Jawa : Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta : GIP
- Iik Arifin Mansur Noor, 1990, *Islam ini an Indonesian World : Ulama of Madura*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Imron Arifin, 1992, *Kepemimpinan Kiai : Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang : Kalimasada Press
- Imam Nahrawi, 2005, *Moralitas Politik PKB : Aktualita PKB Sebagai Partai Kerja, Partai nasional dan Partai Modern*, Malang : Averroes
- In'am Sulaiman, 2010, *Masa depan Pesantren: Eksistensi Pesantren Di Tengah Gelombang Modernisasi*, Malang : Madani
- Indi Aunullah, 2006, *Bahasa dan Kuasa Simbolik Dalam Pandangan Pierre Bourdieu*, Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Filsafat UGM
- John W. Creswell, 1994, *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*, London : SAGE Publications
- Kang Young Soon, 2008, *Antara Tradisi dan Konflik : Kepolitan NU*, Jakarta : UI Press
- Kacung Marijan, 1992, *Quo Vadis NU : Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, Jakarta : Erlangga
- Khamami Zada (ed.), 2010, *Nahdlatul Ulama : Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, Jakarta : Kompas
- Khoiruddin, 2005, *Politik Kiai : Polemik Keterlibatan Kiai Dalam Politik*, Malang : Averroes
- Komaruddin Hidayat, M. Yudie Haryono, 2004, *Manuver Politik Ulama : Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara*, Yogyakarta : Jalasutra
- Leslie Palmer, 1973, *Communists in Indonesia*, London : Weidenfeld and Nicholson
- Luluk Yunan Ruhensi, *Kiai dan Pendidikan Pesantren : Studi Tentang Motif Perubahan Perilaku Kiai Pesantren di kabupaten Ponorogo*, Disertasi, Tidak Dibukukan
- M.Faiqul Ikhsan, *Khithah 1926 dan Perilaku Politik Ulama NU*, Tesis, Tidak dibukukan
- Martin van Bruinessen, 1994, *NU : Tradisi, Relasi Kuasa dan pencarian wacana Baru*, Yogyakarta : LKiS
- Mahrus Irsyam, 1984, *Ulama dan Partai Politik*, Jakarta : Yayasan Perkhidmatan
- M.Muchsin Jamil, 2005, *Tarekat dan Dinamika Sosial Politik : Tafsir Sosial Sufisme Nusantara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Manfred Ziemek, 1986, *Pesantren dalam Perubahan*, Jakarta : P3M
- Masruhan, 2010, *Konflik Politik Kiai NU Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008* :

- Analisis Fiqh Ikhtilaf*, Disertasi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Tidak Dibukukan
- Mochtar Naim, 1960, “*The Nahdlatul Ulama as a Political Party, 1952-1955 : An Enquiry into the Origins of Its Electoral Success*”, (MA Thesis, McGill University)
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta : UI Press
- Michael Quinn Patton, 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nirzalin, *Krisis Agensi Politik Teungku Dayah di Aceh*, Disertasi, Program Doktor Sosiologi, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2011
- Norman Blaikie, 2000, *Designing Social Research*, Cambridge UK : Polity Press
- Norman.K.Denzin, Yvonna S.Lincoln (Eds.), 2008, *The Landscape of Qualitative Research*, London : SAGE Publications
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (Eds.), 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London : SAGE Publications
- Pierre Bourdieu, 1991, *Language and Symbolic Power*, Cambridge, Polity Press
- _____, 1990, *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge, Cambridge University Press
- _____, 1984, *Distinction : A Social Critique of the Judgment of Taste*, London, Routledge
- _____, 1990, *In Other Words : Essays Towards a Reflexive Sociology*, Cambridge, Polity Press
- Pradjarta Dirdjosanjoto, 1999, *Memelihara Umat : Kiai Pesantren, Kiai Langgar di Jawa*, Yogyakarta : LKiS
- Richard Harker, et.all, 2003, *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik*, Yogyakarta, Jalasutra
- Ridwan, 2004, *Paradigma Politik NU : Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda
- Sabili, *Islam Kawan atau Lawan*, Majalah Islam Edisi Khusus, Juli 2004
- Sabili, *Sejarah Emas Muslim Indonesia*, Majalah Islam, No.9 Th.X 2003
- Sholahuddin Malik, *Kepemimpinan Pesantren dan Rutinisasi Kharisma, Studi di PP As-Syafi’iyyah*, Jakarta, Tesis UI, Tidak dibukukan
- Syaiful Arif, 2010, *Runtuhnya Politik NU : Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, Jakarta : Kompas
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta
- _____, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Sidik Jatmika, 2005, *Kiai dan Politik Lokal : Studi Tentang Reposisi Politik Kiai NU Kebumen, Jawa Tengah Memanfaatkan Peluang Keterbukaan Partisipasi di Era Reformasi*, Disertasi, Program Doktor Sosiologi UGM, Tidak Dibukukan
- Sukamto, 1999, *Dinamika Kepemimpinan Kiai*, Jakarta : LP3S
- Sunyoto Usman, 1990, *Local Elities and development*, Flinders University, Australia, Disertasi, Tidak Dibukukan
- _____, *Komunitas Tarekat dan Politik Lokal di Era Orde Baru, Penelitian di Kudus, Jawa Tengah*, Jurnal JSP, Fisipol UGM, Juli 1998
- S. Nasution, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Bandung : Transito
- Tashwirul Afkar, *Simpang Jalan NU*, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 17 Tahun 2004
- Yusny Saby, 2000, *A Profile Of The “Ulama” in Acehnese Society*”, *Al Jamiah (Journal Of Islamic Studies)*, Yogyakarta : Volume 38, Number 2
- Zainal Arifin Thoha, 2003, *Runtuhnya Singgasana Kiai : NU, Pesantren dan Kekuasaan*,

*Pencarian Tak Kunjung Selesai, Yogyakarta : Kutub
Zamakhsyari Dhofier, 1982, Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai,
Jakarta : LP3ES*